

BAB II

HUBUNGAN JEPANG DAN AMERIKA SERIKAT DALAM BIDANG KEAMANAN

Bab ini berisi tentang pemaparan hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan. Bahwa keputusan Jepang untuk menyepakati revisi *Japan-US Defense Guidelines* tahun 2015 tidak terlepas dari keterikatan Jepang dalam sebuah hubungan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat yang terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia II. Pemaparan tersebut meliputi sejarah singkat awal lahirnya hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat yang diawali oleh kekalahan Jepang pada Perang Dunia II hingga masuknya pengaruh serta keterlibatan Amerika Serikat di Jepang dalam urusan pertahanan keamanan Jepang. Selanjutnya intensitas hubungan Jepang dan Amerika Serikat terjalin erat hingga terciptanya suatu kerjasama keamanan yang mempengaruhi kondisi keamanan dan pertahanan Jepang.

A. Sejarah Singkat Hubungan Jepang dan Amerika Serikat

Pecah Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1939 adalah konflik internasional yang melibatkan dua kubu saling berseteru antara blok poros dan blok sekutu. Konflik ini merupakan bagian dari perpanjangan sisa konflik Perang Dunia I yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Ditengah panasnya konflik Perang Dunia II, Jepang melakukan ekspansi wilayah di kawasan Asia Pasifik hingga menarik perhatian pihak sekutu. Hal inilah yang akan menjadi pemicu awal perubahan besar dalam kondisi politik internasional. (Ashari, 2015, p. 475)

1. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II

Terbebas dari politik isolasi pada tahun 1868, Jepang berupaya memperluas pengaruhnya secara global dengan melancarkan imperialisme Jepang ke negara-negara Asia. Jepang sangat agresif dalam menunjukkan kekuatan militernya. Jepang melancarkan invasi dengan menempatkan kekuatan militernya untuk menguasai suatu wilayah dan terlibat dalam berbagai perang. Jepang menunjukkan diri sebagai negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat dan patut untuk diperhitungkan di kancah global. (Riyanto, 2012)

Salah satu agresifitas Jepang yang menjadi sorotan dunia internasional adalah pada saat Jepang melakukan invasi untuk menaklukkan Tiongkok dibawah kekuasaan Jepang. Puncaknya pada 13 Desember 1937 terjadi tragedi “kekejaman Nanking” yang dilakukan oleh militer Jepang yaitu aksi pembunuhan massal terhadap 300.000 orang selama enam minggu. Selain itu, dibawah kepemimpinan Jendral Matsui Iwane, terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam skala berat lainnya berupa perbudakan seksual dan pembunuhan terhadap wanita serta anak-anak lebih dari 20.000 orang hingga menorehkan luka mendalam bagi rakyat Tiongkok sampai saat ini. (Zakiya, 2012) Kekejaman tersebut mendapat kecaman dunia, diantaranya berasal dari negara-negara Amerika, Eropa dan Asia Tenggara. Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap Jepang atas kekejamannya tersebut dengan memberlakukan embargo ekonomi terhadap Jepang berupa pelarangan ekspor besi, baja dan minyak ke Jepang sehingga Jepang kehilangan 90% sumber persediaan minyaknya. Hal tersebut secara otomatis melemahkan kekuatan militer dan ekonomi Jepang. (Santosa, 2012)

Disisi lain Jepang sukses menguasai Vietnam dengan mengusir penjajahan Perancis di Vietnam. Jepang juga berhasil menduduki Indonesia setelah memukul mundur penjajahan kolonial Belanda yang sebelumnya telah menguasai Indonesia lebih dari tiga abad. Ketika Jepang didera embargo minyak oleh Amerika Serikat akibat invasinya di Tiongkok, Jepang semakin memperluas cakram imperealismenya ke negara Asia Tenggara yakni Indonesia. Target utama Jepang adalah Indonesia agar dapat menguasai wilayah territorial dan sumber minyak yang dimiliki Indonesia – yang saat itu bernama Hindia-Belanda. Jepang sukses menguasai Indonesia dengan menggunakan propaganda di Indonesia melalui Gerakan Tiga A (*AAA movement*) yang berisi tiga semboyan yaitu Jepang pemimpin Asia (*Japan the Leader of Asia*), Jepang pelindung Asia (*Japan the Protector of Asia*) dan Jepang cahaya Asia (*Japan the Light of Asia*). (Dower, 1986, p. 6)

Walaupun berhasil melebarkan sayap kekuasaannya di Asia, Jepang mendapat hambatan dan masalah yang berasal dari Amerika Serikat berupa embargo minyak serta mendapat kecaman dari dunia internasional. Konflik terbuka antara Jepang dan Amerika Serikat ini tidak dapat dihindarkan karena satu sama lain saling mengklaim negaranya sebagai negara terkuat. Amerika Serikat yang notabene memiliki kemampuan dan kapasitas militer yang kuat merasa tersaingi dengan meningkatnya kekuatan militer yang dimiliki Jepang. Ditambah lagi dengan ambisi Jepang menguasai Asia sehingga tidak menutup kemungkinan Jepang akan berambisi untuk menguasai dunia.

a. Penyerangan Jepang terhadap Pangkalan Militer Amerika Serikat

Kepercayaan diri Jepang semakin meningkat dengan didukung oleh kapasitas militer Jepang yang semakin mutakhir. Jepang tidak ingin terjebak dalam konflik terbuka dengan Amerika Serikat terlalu lama. Jepang menargetkan penyerangan terhadap pangkalan militer Pearl Harbor milik Amerika Serikat yang berada di Hawaii. Secara strategis Jepang melakukan pengintaian guna mendapatkan informasi intelejen tentang angkatan laut dan militer di daerah pesisir barat Terusan Panama dan Hawaii. Kemudian Jepang mengirimkan pesan peringatan akan melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat tersebut. Amerika Serikat tidak menanggapi peringatan penyerangan tersebut sebagai ancaman yang serius karena Amerika Serikat meyakini bahwa kekuatan militer Jepang tidak mampu menembus pertahanannya. (Handoko, 2014)

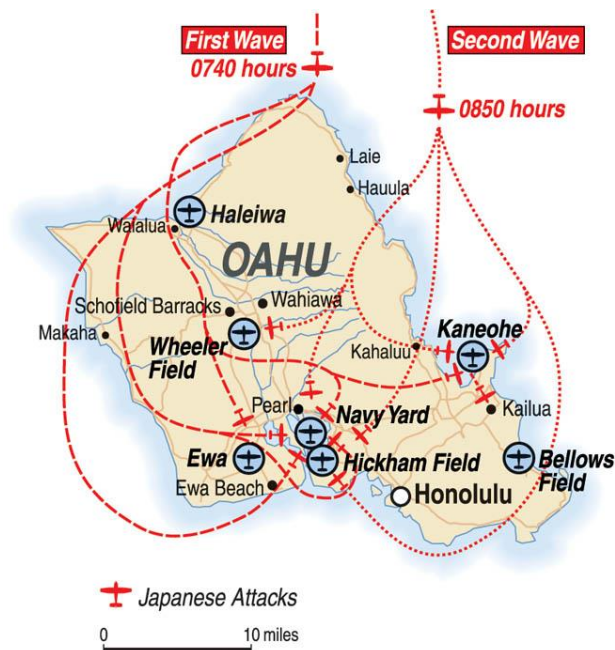
Gambar 2. 1 Rute Penyerangan Jepang ke Pearl Harbor



Sumber: <http://www.pearlharborattacked.com/cgi-bin/IKONBOARDNEW312a/ikonbroad.cgi?act=Print;f=15;t=4>

Berdasarkan gambar diatas, rute penyerangan Pearl Harbor yang dilakukan oleh Jepang dimulai sejak 25 November 1941. Armada kapal induk Jepang Kido Butai yang membawa enam *carrie-based* beserta pesawat tempurnya berangkat dari teluk Hitokappu menuju kepulauan Hawaii. Ditengah perjalanannya mengarungi lautan Pasifik, armada perang tersebut berhenti sejenak untuk melakukan pengintaian dan mengisi ulang bahan bakar pada 3 Desember pada tahun yang sama. Sejauh 3000 mill, armada kapal induk Jepang tidak terdeteksi oleh pangkalan militer milik Amerika Serikat. Hingga pada 7 Desember 1941, Kido Butai berhasil meuncurkan pesawat tempur nya sejauh 230 mill menuju pulau Oahu. (Kelly & Swenson, 2013)

Gambar 2. 2 Serangan Pertama dan Kedua Jepang ke Pearl Harbor



Sumber: <http://pasificwarbirds.com/japanese-attack-on-pearl-harbor-maps/>

Dapat dilihat melalui gambar diatas rute penyerangan Pearl Harbor dilakukan dalam waktu yang cukup singkat melalui jalur udara, pasukan Jepang

dengan menggunakan pesawat tempur berhasil melancarkan serangan luar biasa. Serangan pertama terhadap Oahu ditujukan ke Haleiwa Field, Wheeler Air Base, Schoefield Barracks dan Ewa Air Base serta beberapa wilayah dekat Pearl Harbor. Berselang satu jam, serangan kedua berhasil dilancarkan pasukan Jepang dan menghancurkan titik-titik penting seperti Naval Air Station di teluk Kaneohe, Bellows Field dan Hickam Air Base. Pada puncaknya serangan kedua tersebut berhasil menghancurkan pusat pangkalan militer Pearl Harbor hingga pasukan militer Amerika Serikat tidak mampu menyelamatkan diri dan kesulitan melakukan serangan balik karena Jepang terlebih dahulu menghancurkan Oahu. (Kelly & Swenson, 2013)

Dalam waktu kurang dari dua jam, Pearl Harbor porak poranda seketika dan mengejutkan pasukan militer Amerika Serikat karena pada saat itu Jepang dan Amerika Serikat dalam keadaan damai, bahkan perwakilan diplomatic Jepang ditempatkan di Amerika Serikat secara resmi. Diketahui bahwa Komandan angkatan militer Husband E Kimmel, dan Komandan Unit Walter Short tidak mengetahui informasi akan datangnya serangan dari Jepang. Disisi lain, badan intelejen Amerika Serikat telah berhasil mendapatkan dan memecahkan informasi tentang penyerangan Jepang tersebut. Namun jajaran pimpinan angkatan militer Amerika Serikat di pusat memiliki wewenang untuk mengirimkan informasi intelejen ke seluruh pangkalan militer milik Amerika Serikat yang berada berbagai wilayah tidak menginformasikan informasi intelejen tersebut ke Pearl Harbor. Jendral George C. Marshall dan Leonard T. Gerow, serta komandan Amerika Serikat Harold R. Stark dan Richmond Kelly Turner bersama presiden Franklin D.

Roosevelt berada di Gedung Putih mempertimbangkan keputusan lain. Mereka meyakini bahwa penyerangan yang akan dilakukan oleh Jepang akan mengarah ke Pearl Harbor secara langsung karena pangkalan tersebut adalah pangkalan terluar dan paling terkenal milik Amerika Serikat. Dengan membiarkan Pearl Harbor diserang, maka Amerika Serikat dapat melibatkan diri dalam Perang Dunia II. Hal ini dilakukan karena sebelumnya setelah Perang Dunia I berakhir, Amerika Serikat mendeklarasikan diri sebagai negara yang berkomitmen tinggi dalam menjaga perdamaian dunia dengan tidak terlibat dalam perang. (Richardson & Fisher, 2006)

Diluar dugaan, serangan Jepang mengarah ke bagian utara pulau Oahu terlebih dahulu hingga melumpuhkan gerak langkah pasukan Amerika Serikat. (Kelly & Swenson, 2013) Tidak diketahuinya sumber informasi tentang penyerangan tersebut, pemerintah Amerika Serikat melimpahkan kelalaian terhadap komandan militer yang berada di Pearl Harbor yakni Komandan Husband E Kimmel, dan Komandan Unit Walter Short. Dampak kehancuran pun tidak dapat dihindari. (Richardson & Fisher, 2006)

Tabel 2. 1 Laporan Kerusakan Penyerangan Pearl Harbor

Pearl Harbor Attack Damage Report	
Japan Damage Report	U.S. Damage Report
<p>185 killed</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 55 airmen ✓ 121 sub crewmen ✓ 9 midget-sub crewmen <p>Aircraft lost</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 9 fighters ✓ 15 dive bombers ✓ 5 torpedo planes <p>Subs lost</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 sub ✓ 5 midget-sub 	<p>2.403 killed</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2.008 navy ✓ 218 army ✓ 109 marines ✓ 68 civilians <p>1.178 wounded</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 710 navy ✓ 364 army ✓ 68 marines ✓ 35 civilians <p>Battleships</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ All 8 heavily damaged ✓ 3 sunk ✓ 2 capsized ✓ 1 run aground <p>Cruiser</p> <p>2 heavily damaged, 1 collateral damage</p> <p>Destroyers</p> <p>1 Sunk, 2 heavily damaged</p> <p>Other ships</p> <p>USS Utah target ship sunk, 5 support ship</p> <p>Aircraft lost</p> <p>Bellow Field-10, Ewa-33, USS Enterprise-5, B-17's-4, Ford Island-26, Hickam Field-18, Kaneohe-33, Wheeler Field-40</p>

Sumber: http://media.nola.com/military_impact/other/December%2007.pdf

Diketahui dari data table diatas, kerusakan akibat dari penyerangan Jepang ke Pearl Harbor tak terelakkan. Dalam kasus ini, Amerika Serikat menderita kerugian yang paling parah, hingga kehilangan 2.403 pasukannya tewas dan sebanyak 1.178 pasukan angkatan darat, udara dan laut termasuk juga warga sipil mengalami luka-luka. Walaupun tidak sebanyak Amerika Serikat, namun Jepang juga kehilangan

pasukannya 185 orang dan angka ini pun termasuk kecil dibandingkan pasukan Amerika Serikat yang jadi korban. Tidak hanya itu, sarana militer dan persenjataan milik Amerika Serikat hancur seperti kapal perang, kapal penjelajah, armada pemusnah, pesawat terbang dan lain-lain. Serangan udara pasukan Jepang tersebut berhasil menghancurkan 20 kapal perang dan 200 pesawat terbang milik Amerika Serikat serta menghilangkan lebih dari 2000 nyawa prajurit tantara Amerika Serikat. (Kelly & Swenson, 2013) Amerika Serikat menderita kerugian yang sangat besar. Penyerangan Jepang di Pearl Harbour ini merubah situasi internasional pada saat itu. Dibawah kepemimpinan presiden Flanklin D. Roosevelt dan setelah mendapat persetujuan dari Kongres, Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap Jepang. (Handoko, 2014)

b. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat

Pasca penyerangan Pearl Harbor, badan intelejen milik Amerika Serikat melakukan investigasi untuk penyelidikan mendalam tentang penyerangan tersebut. Empat tahun kemudian, pada tahun 1945 dibawah perintah Presiden Harry S. Truman, Amerika Serikat berniat melancarkan serangan balas dendam. (Ballweg & Nangoy, 2015) Dengan teknologi yang dimilikinya, Amerika Serikat memproduksi tiga bom atom untuk menyerang Jepang. Setelah berhasil melakukan uji coba bom atom yang pertama sejauh 80 km dari Alamogordo, New Mexico pada 16 Juli 1945. (Nishiwaki, 1995, p. 1)

Setelah dilakukan pengawasan dan pengamatan jarak jauh dari Tinian Base yang berada di kepulauan Mariana, Pasifik, bom atom kedua diberi nama "*Little*

Boy” yang mengandung uranium 235 dijatuhkan dari pesawat Enola Gay. Pada 6 Agustus 1945, “*Little Boy*” berhasil meledak di ketinggian kurang lebih 580 meter dari atas kota Hiroshima dan meluluhlantakkan hamper 80% kota terbesar di Jepang itu. Seputaran radius pusat ledakan pun dapat dipastikan tidak ada yang selamat, sekalipun ada warga Hiroshima yang selamat namun tidak dapat terhindar dari luka bakar yang sangat mengerikan mengingat kandungan nuklir yang mengakibatkan radiasi yang parah. (Nishiwaki, 1995, p. 1)

Amerika Serikat tidak ingin korban jiwa bertambah lebih banyak akibat peperangan yang dilakukan Jepang, oleh karenanya Perang Dunia II ini harus diakhiri. Serangan ini ditujukan agar Jepang berhenti melakukan ekspansi dan imperealismenya serta bersedia menyerah kalah terhadap sekutu. Kekaisaran Jepang melonak untuk menyerah dan dibawah Kaisar Hirohito, Jepang tetap melangsungkan peperangan di kawasan Pasifik. Pada saat itu dampak dari hancurnya Hiroshima masih diabaikan oleh pemerintah pusat karena belum terasa dampak yang luar biasa. (Mandey, 2015) Disisi lain, para pemimpin sekutu melakukan pertemuan di Postdam, Jerman untuk mengatur strategi bagaimana menjatuhkan Jepang. Pertemuan tersebut diikuti oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Pemimpin Uni Sovyet Josef Stalin yang menginginkan penyerahan tanpa syarat oleh Jepang. (Ballweg & Nangoy, 2015)

Pengeboman Hiroshima yang menjadi ultimatum pihak Amerika Serikat dan Sekutu tidak diindahkan Jepang serta tetap teguh menjaga harga diri kekaisarannya. Belum usai kehancuran pusat kota Hiroshima yang menelan

puluhan ribu jiwa dengan kerusakan yang sangat parah hingga seluruh bangunan di pusat kota rata dengan tanah, kembali serangan besar kedua dilancarkan Amerika Serikat. (Ballweg & Nangoy, 2015) Dua hari setelah Hiroshima hancur, dua pesawat B-29 “*Bockscar*” milik Amerika Serikat berangkat dari Tinian Base dengan membawa bom atom kedua yang diberi nama “*Fat Man*”. Serangan tersebut awalnya menargetkan prefektur Fukuoka yang berada di kepulauan Kyusu, namun terhalang oleh cuaca buruk “*Fat Man*” yang mengandung plutonium 239 dijatuhkan ke Nagasaki. (Nishiwaki, 1995) Seketika Nagasaki menjadi kota mati dan puluhan ribu orang meninggal dunia hingga bulan-bulan berikutnya meningkat dua kali lipat akibat terkena paparan radiasi nuklir. Kehidupan di pusat kota dan perekonomiannya lumpuh total.

Gambar 2. 3 Jumlah Korban Jiwa Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki



Sumber: <http://america.aljazeera.com/articles/2015/7/18/a-bomb-victims-forsaken-in-japans-push-toward-militarization.html>

Dari grafik diatas, korban jiwa yang meninggal dalam pengeboman pada Agustus 1945 di Hiroshima sebanyak 140.000, sedangkan di Nagasaki sebanyak 70.000. Jumlah korban jiwa yang tidak sedikit mengingat korban jiwa terus bertambah hingga tahun 1985, di Hiroshima sendiri korban bertambah hingga

61.990, sedangkan di Nagasaki bertambah 23.966 jiwa. Serangan balasan yang dilakukan Amerika Serikat tersebut sebelumnya belum pernah dilakukan dan tidak terprediksi seberapa besar akibat yang ditimbulkan. Dahsyatnya serangan Amerika Serikat memukul keangkuhan Jepang. Kaisar Hirohito memerintahkan panglima perangnya untuk mempersiapkan deklarasi kekalahan dan penyerahan diri terhadap Amerika Serikat dan Sekutu. Walaupun keinginan Kaisar untuk menyatakan kekalahan tidak diamini oleh masyarakat Jepang, melalui saluran radio pada 14 Agustus 1945 Kaisar Hirohito mengumumkan secara resmi kekalahan Jepang kepada Amerika Serikat dan Sekutu. Dengan demikian, Kaisar tidak lagi memiliki hak dan wewenang penuh sebagai pemimpin Jepang seperti sebelumnya. Hal ini menjadi momentum berakhirnya Perang Dunia II. (Mandey, 2015)

2. Pengaruh dan Keterlibatan Amerika Serikat di Jepang

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi pintu gerbang awal masuknya pengaruh dan kendali Amerika Serikat di Jepang. Segera setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki, dua minggu setelahnya tentara sekutu Amerika Serikat langsung menduduki Jepang. Kemudian pasukan Amerika Serikat melakukan penangkapan terhadap pihak yang dianggap sebagai dalang dari penyerangan tentara Jepang di Pearl Harbour. Tentara sekutu Amerika Serikat yakni *Supreme Comando for the Allied Powers* (SCAP) diperintahkan untuk mengambil alih kontrol atas Jepang. Di bawah kendali SCAP, media dan informasi serta telekomunikasi di Jepang dibatasi. SCAP juga mengawasi gerak gerik kelompok-kelompok di Jepang yang melakukan agenda bernuansa anti atau menentang Amerika Serikat. (Tsuciyama, 2000, p. 137)

Pengaruh yang sangat kuat terhadap Jepang adalah disaat Amerika Serikat mengakomodir pemerintah Jepang dalam membuat konstitusi baru pasca kalah perang. Konstitusi merupakan hal mendasar yang menjadi prinsip serta pedoman suatu negara melangsungkan kebijakannya. Turut campurnya Amerika Serikat telah menembus batas kedaulatan Jepang pada level terpenting suatu negara. Amerika Serikat ingin memegang kendali penuh seluruh komponen baik dalam dan luar negeri Jepang, tidak terkecuali pada aspek pertahanan dan keamanan Jepang.

Doughlas Mc Athur sebagai komandan SCAP memerintahkan Jepang untuk membuat suatu konstitusi yang membatasi ruang gerak militer Jepang. Pedoman tersebut berupa Pasal 9 Konstitusi baru Jepang yang berbunyi;

“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of preceding paragraph, land, sea and air forces, as well as war potential, will never be maintained. The right belligerency of the state will not be recognized.” (Tsuciyama, 2000)

Jepang dalam keadaan sekarat dengan pertimbangan secara rasional tidak dapat menolak untuk tidak setuju terhadap perintah Amerika Serikat dalam pembuatan Pasal 9 Konstitusi baru tersebut. Dengan adanya konstitusi tersebut, Jepang terikat dalam suatu komitmen untuk tidak mendukung perang perang dan tidak menggunakan kekerasan melalui instrument militernya dalam menyelesaikan konflik internasional. Komitmen Jepang ini juga dilakukan untuk mengembalikan citra dan reputasi Jepang di mata publik internasional. Jepang juga ingin mendapatkan kembali kepercayaan negara-negara lain yang sebelumnya telah

hilang saat Jepang terlibat dalam Perang Dunia II dan akhirnya menyerah kalah dengan beban kerugian yang sangat besar. (Plano & Olton, 1999)

Disahkannya Pasal 9 Konstitusi baru Jepang, Amerika Serikat berhasil “mengebiri” militer Jepang dalam sistem pertahanan dan keamanannya. Jepang tidak dapat menggunakan instrument militernya secara bebas sesuai kehendak Jepang sendiri. Pembatasan tersebut agar Jepang tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan penyerangan terhadap negara lain. Hal ini memperkecil kekhawatiran negara-negara lain akan bangkitnya kembali agresifitas Jepang.

Pergeseran situasi internasional yang tadinya porak poranda akibat Perang Dunia II berganti dengan persaingan sensitif antara dua kekuatan besar yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet kala itu. Kehidupan politik internasional memasuki musim Perang Dingin. Isu yang bergulir pada saat itu bukan lagi tentang keamanan, namun berubah menjadi persaingan tentang penyebaran ideologi sebagai agenda utamanya. Padahal sebelumnya kedua negara tersebut tergabung dalam satu aliansi pada Perang Dunia II sebagai sekutu. Karena tidak adanya musuh bersama yang harus dihadapi, maka keduanya saling bersaing satu sama lain. (Ashari, 2015)

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet kian meningkat sampai keduanya memusatkan perhatian mereka ke Korea sebagai target penyebaran ideologi masing-masing negara. Hingga pada akhirnya pecah perang Korea atau *Korean War* pada tahun 1951. Perang ini terjadi antara Korea Selatan (*Republic of Korea*) dan Korea Utara (*Democratic People's Republic of Korea*) yang disebabkan oleh pembagian wilayah semenanjung Korea sejak tahun 1945. Konflik ini tidak

menemui titik terang, hingga semakin memanas ketika masuknya dukungan Uni Soviet kala itu terhadap Korea Utara dengan melancarkan invasi ke Korea Selatan dan Tiongkok. Benturan kelompok sayap kanan dan sayap kiri semakin tidak terkendali hingga kedua belah pihak menghendaki untuk tidak melakukan penggabungan kembali atau unifikasi. (Ashari, 2015, p. 273)

Secara ideologis, saat itu Amerika Serikat berhasil menguasai Korea bagian Selatan, sedangkan Korea bagian utara mulai dikuasai Uni Soviet. Amerika Serikat ingin membendung serta menghentikan geliat pengaruh Uni Soviet di Korea. Keinginan untuk mempertahankan pengaruhnya di Asia, Amerika Serikat memerintahkan pasukan militer SCAP yang berada di Jepang untuk pergi mengkondisikan Korea. Namun di sisi lain Amerika Serikat tidak ingin melepaskan kontrol dan kendalinya di Jepang begitu saja. Oleh karenanya Amerika Serikat melalui SCAP memberikan perintah kepada Jepang untuk memiliki pasukan militer sendiri. Selama masa pendudukan SCAP di Jepang, pasukan militer Jepang dilucuti dan tidak diperbolehkan menggunakan persenjataan. Akhirnya Jepang memiliki Pasukan Keamanan Nasional atau *National Police Reserve* (NPR) sebagai pasukan militernya. Dalam praktiknya, Pasukan Keamanan Nasional Jepang berperan sebatas sebagai polisi. Kinerja yang terbatas ini tidak dapat meng-*cover* pertahanan keamanan Jepang. Kemudian Pasukan Keamanan Nasional tersebut diganti dengan Pasukan Bela Diri atau *Self Defense Forces* (SDF) yang memiliki tugas yang lebih kompleks. (Tsuciyama, 2000)

B. Kerjasama Jepang dan Amerika Serikat pasca Perang Dunia II dalam Bidang Keamanan

Perang Dunia II diakhiri dengan rangkaian kekalahan Jepang yang berujung pada pendudukan Amerika Serikat di Jepang. Pasca berakhirnya okupasi Amerika Serikat di Jepang, hubungan kedua negara tetap terjalin dan saling berusaha mengurangi tensi. Bersamaan dengan keluarnya SCAP dari Jepang, kedua negara melakukan kesepakatan yang menjadi cikal bakal kerjasama bilateral dibidang keamanan. Melalui kerjasama bilateral yang disepakati, lahirlah sebuah aliansi kuat antara Jepang dan Amerika Serikat. Pada 8 September 1951, antara Jepang dan Amerika Serikat menyepakati dua perjanjian yakni *San Fransisco Treaty* dan *Japan-US Security Treaty*.

1. Kesepakatan San Fransisco Treaty

Kekuatan militer Jepang telah di *cover* oleh *Self Defense Forces* (SDF) sebagai pertahanan negara, namun pengaruh Amerika Serikat di Jepang tetap kuat. Walaupun persenjataan Jepang telah dikembalikan setelah dilucuti SCAP sebelumnya, peranan SDF sebagai pasukan bela diri sangatlah terbatas. SDF menjalankan tugasnya hanya pada saat Jepang diserang oleh musuh saja. Ketika Jepang mendapatkan ancaman dan serangan dari musuh, SDF dapat melakukan serangan pertahanan dengan senjata secara aktual.

Sebagai pihak yang kalah perang, Jepang tidak dapat lagi mempertahankan eksistensinya di kancah global. Jepang lebih memilih untuk memperbaiki perekonomiannya yang pada saat itu *collapse* akibat kalah perang. Jepang juga bersedia untuk menyepakati sebuah perjanjian damai yang dirancang sebagai

komitmen bersama negara-negara untuk menjaga perdamaian dunia. Jepang yang diwakili oleh Perdana Menteri Yoshida Shigeru menandatangani perjanjian damai *San Fransisco Treaty* pada 8 September 1951 di kota San Fransisco. (Price, 2001)

Gambar 2. 4 Penandatanganan Perjanjian Damai *San Fransisco Treaty*



Sumber: <http://www.us.emb-japan.go.jp/english/html/japanus/japanusoverview2009.htm>

Penandatanganan *San Fransisco Treaty* ini adalah bentuk upaya Jepang dan Amerika Serikat menjaga komitmen damai untuk tidak saling menyerang. Keduanya bersepakat untuk menjaga perdamaian sesuai mandat Perserikatan Bangsa-bangsa dan tidak akan terlibat atau memulai perang. Dua pokok pikiran utama *San Fransisco Treaty* yakni tentang kesepakatan damai untuk tidak saling menyerang dan untuk mengakhiri ketegangan satu sama lain. Tujuh *chapter* dalam *San Fransisco Treaty* ini bagi Jepang adalah sebuah bentuk tanggungjawab yang harus dipikul Jepang sebagai pihak yang kalah perang. (Price, 2001)

Berdasarkan *San Fransisco Treaty*, kependudukan Amerika Serikat di Jepang resmi berakhir. Baik Jepang maupun Amerika Serikat mempublikasikan

damai bersamaan dengan pengakuan kedaulatan Jepang oleh Amerika Serikat. Selama memenangkan berbagai peperangan, Jepang mendapat wilayah rampasan perang. Kemudian Jepang harus bersedia melepaskan kontrol dan mengembalikan wilayah rampasannya seperti Korea, Formosa, kepulauan Pescadores, Sakhalin, kepulauan Kuril, pulau Paracel dan lain-lain. Jepang juga memberikan wilayah teritorialnya, Okinawa yang berada di kepulauan Ryuku dibawah kontrol Amerika Serikat. Jepang mengakui *UN Charter* yang berisi tentang perdamaian dunia, namun Jepang masih memungkinkan untuk ikut bergabung dalam kerjasama keamanan secara kolektif dengan negara lain. Jepang menyerahkan hak istimewanya di Tiongkok dan menerima keputusan dari *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE). Jepang juga memenuhi pemberian kompensasi terhadap klaim wilayah yang dilakukannya. Segala permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas diselesaikan dan dilimpahkan ke *International Court of Justice*. (Price, 2001)

2. Kesepakatan Japan-US Security Treaty

Setelah penandatanganan *San Fransisco Treaty*, Jepang dan Amerika Serikat melanjutkan hubungan kerjasama keamanan dalam bentuk formal melalui penandatanganan *Japan-US Security Treaty* di hari yang sama. Jepang dan Amerika Serikat ingin mempererat persahabatan yang terjaga dalam situasi damai dnegan berlandaskan prinsip demokrasi, kebebasan individu, menjunjung tinggi hukum yang berlaku, menguatkan kerjasama ekonomi. Kedua negara mengimplementasikan *United Nations (UN) Charter* dalam mewujudkan perdamaian dunia. Meskipun dengan adanya *Japan-US Security Treaty*, kedua

negara tetap mengakui masing-masing negara memiliki hak dan tidak terikat sepenuhnya. Kedua negara juga dapat bekerja sama secara kolektif hanya dalam bidang pertahanan – tidak lebih, seperti yang tertera dalam *UN Charter*. Dengan adanya pertimbangan bahwa kedua negara memiliki pandangan yang sama untuk menjaga perdamaian dunia di Asia Timur, oleh karena itu mereka membuat *mutual cooperation* atau kerjasama yang saling menguntungkan melalui *Japan-US Security Treaty* ini. (Ministry of Foreign Affairs, 2014)

Berdasarkan perjanjian tersebut, Amerika Serikat memiliki hak untuk mempertahankan kekuatan darat, laut dan udaranya di Jepang. Kekuatan ini dapat dipergunakan: (1) untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan di Timur Jauh tanpa konsultasi terlebih dahulu; (2) setelah berkonsultasi, Amerika Serikat dapat melakukan tindakan untuk mempertahankan Jepang dari serangan pihak luar. Perjanjian tersebut merinci bahwa operasi yang dijalankan dari basis Jepang oleh pihak lain “harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah Jepang”. (Plano & Olton, 1999, p. 152)

Jepang mendeklarasikan diri untuk menjunjung tinggi perdamaian, tidak menutup kemungkinan Jepang akan dalam posisi yang berbahaya dan terancam. Jepang menginginkan adanya *security treaty* dengan Amerika Serikat. Sebagai negara yang berdaulat, Jepang memiliki hak untuk bergabung dalam kerjasama keamanan yang diakui UN Charter. Dengan adanya *Japan-US Security Treaty*, Amerika Serikat yang memiliki *interest* terhadap perdamaian dan keamanan dapat menggunakan *US Forces* untuk melindungi Jepang. meskipun demikian, Jepang juga memiliki tanggungjawab untuk menjaga pertahanan keamanannya untuk melindungi diri dari ancaman langsung dan tidak langsung. Jepang membatasi kapasitas militernya hanya sebatas pertahanan dan tidak untuk upaya penyerangan atau *offensive*. (Document Cloud)

Tertuang dalam perjanjian tersebut dalam 5 artikel menyatakan bahwa Amerika Serikat menerima permintaan Jepang untuk melindungi keamanannya dari serangan dan ancaman musuh. Amerika Serikat juga diberikan hak menggunakan pasukan lengkap dengan persenjataannya di wilayah darat, laut dan udara milik Jepang untuk menjaga kedamaian dan keamanan di Asia Timur. Selama Amerika Serikat berada di Jepang, Jepang tidak akan mengizinkan pihak atau kekuatan (militer) ketiga untuk melakukan transit, uji coba manufer dan menempati wilayah Jepang kecuali setelah mendapatkan izin Amerika Serikat. Berlaku juga ketika Amerika Serikat ingin memindahkan *US Forces*-nya, harus mendapat persetujuan serta izin dari Jepang. Perjanjian ini dinyatakan berakhir ketika ada resolusi baru dari *United Nations* atau alternative kebijakan lain yang lebih dapat mengatur perdamaian internasional dan keamanan di Jepang. Perjanjian ini harus melalui proses ratifikasi kedua belah pihak dan resmi berlaku setelah kedua negara melakukan pertukaran ratifikasi di Washington, Amerika Serikat. (Document Cloud)

Mutual Security Treaty ini kemudian diamandemen dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun 1960 di Washington, Amerika Serikat. Seperti yang tertera dalam *UN Charter*, dalam upaya menyelesaikan permasalahan internasional yang melibatkan Jepang dan Amerika Serikat menggunakan sarana damai – yang tidak mengancam. (Plano & Olton, 1999, p. 152) Hal ini menghindarkan agar hubungan antar negara tetap baik dengan tidak menggunakan kekerasan dan tidak saling mengancam serta meniadakan intervensi satu sama lain. Jepang dan Amerika Serikat juga terbuka dalam kerjasama dengan negara-negara yang cinta damai

untuk mewujudkan perdamaian dunia. Jepang dan Amerika Serikat akan menguatkan dan mengembangkan hubungan melalui kerjasama ekonomi. Dalam hubungan kerjasama tersebut, baik Jepang dan Amerika Serikat akan saling memberikan bantuan untuk menghindari serangan. Hal-hal yang menyangkut dalam perjanjian ini akan dilakukan konsultasi secara berkala oleh masing-masing pihak – dalam hal ini Jepang dan Amerika Serikat. kedua negara juga dapat berkonsultasi misalkan pada saat Jepang dalam keadaan terancam, atau ketika kawasan Asia Timur terancam. Ketika wilayah territorial Jepang diserang oleh musuh dan membahayakan kedamaian dan keamanan Jepang secara langsung akan dilaporkan ke *Security Council of the United Nations*. (Ministry of Foreign Affairs, 2014)

Keinginan Amerika Serikat dalam berkontribusi dalam keamanan Jepang sekaligus di Asia Timur, Amerika Serikat diperbolehkan dalam penggunaan fasilitas perjenjataan baik di darat, laut maupun udara di dalam wilayah Jepang. Perjanjian ini tidak dimaknai sebagai pembatasan hak masing-masing negara. Walaupun demikian, bukan berarti kedua negara tidak mematuhi *UN Charter*, melainkan posisi *US-Japanese Security Treaty* tidak melebihi konstitusi dan tidak melanggar batas kedaulatan. Perjanjian ini wajib diratifikasi oleh Jepang dan Amerika Serikat melalui proses konstitusional masing-masing negara. Sehingga perjanjian akan berlaku secara resmi setelah kedua negara meratifikasinya. *US-Japanese Security Treaty* ini resmi ditandatangani kedua belah pihak pada 8 September 1951 di San Fransisco. Setelah diratifikasi oleh pemerintah masing-masing negara, perjanjian ini akan terus berlaku. Perjanjian ini akan dinyatakan

berakhir setahun setelah salah satu atau kedua belah pihak menyatakan untuk mengakhiri perjanjian. (Ministry of Foreign Affairs, 2014)

Perjanjian ini dimaknai sebagai masuknya keterlibatan Amerika Serikat di Jepang dalam bidang keamanan. Amerika Serikat menjadi “payung” militer untuk Jepang yang memiliki hak dan tanggungjawab atas keamanan wilayah territorial Jepang. Amerika Serikat mendapat wilayah territorial Jepang untuk dijadikan pangkalan militer beserta pasukan lengkap dengan persenjataannya di Okinawa Jepang. Hubungan Jepang dan Amerika Serikat terus berlanjut hingga adanya kesepakatan bersama mengenai panduan dalam kerjasama keamanan antara kedua negara yaitu *Japan-US Defense Guidelines* pada 27 November 1978. Panduan tersebut berisi tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan Jepang dan Amerika Serikat dengan keterlibatan SDF dan US *Forces* dalam situasi ketika Jepang diserang oleh pihak luar. (Japan Ministry Of Defense, n.d.)

Hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat dimulai sejak kedua negara terlibat dalam puncak Perang Dunia II tahun 1945. Agresifitas militer Jepang menarik perhatian Amerika Serikat yang kala itu dianggap akan menjadi rival militer yang kuat. Hingga pada tahun 1941 Jepang melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat Pearl Harbor di Oahu kepulauan Hawaii. Serangan inilah yang akhirnya menyulut kemarahan Amerika Serikat yang akhirnya mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Pembalasan dendam Amerika Serikat diwujudkan dengan peluncuran bom atom pertama kali di dunia yang ditujukan dua kota besar Jepang yakni Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini lah yang akhirnya memaksa Jepang untuk mendeklarasikan diri menyerah kalah perang terhadap

Amerika Serikat dan Sekutu. Hubungan kedua negara berlanjut hingga masuknya pengaruh Amerika Serikat dan SCAP di Jepang. Sejak saat itu pula militer Jepang tidak lagi agresif seperti dulu dengan diciptakannya Pasal 9 Konstitusi Jepang dan hanya memiliki hak bela diri melalui SDF. Kedua negara menandatangani perjanjian damai untuk tidak saling menyerang dalam *San Fransisco Treaty* dan perjanjian kerjasama keamanan *Japan-US Security Treaty* pada tahun 1951 yang mengizinkan *US Forces* beroperasi di Jepang serta melindungi pertahanan Jepang dari ancaman kekuatan eksternal.

Hubungan kerjasama keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat semakin erat, yang mana skema kerjasama keamanan tersebut diatur dan dikelola dalam sebuah panduan kerjasama *Japan-US Defense Guidelines*. *Guidelines* tersebut dibuat pertama kali tahun 1978 sebagai panduan kerangka kerja atau *framework* yang membahas seluruh kebutuhan operasional dalam kerjasama keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, *Japan-US Defense Guidelines* yang juga berisi pembagian kerja antara kedua belah pihak mengalami perubahan dan pembaharuan. Hal tersebut akan dibahas oleh penulis dalam bab selanjutnya tentang dinamika *Japan-US Guidelines*.